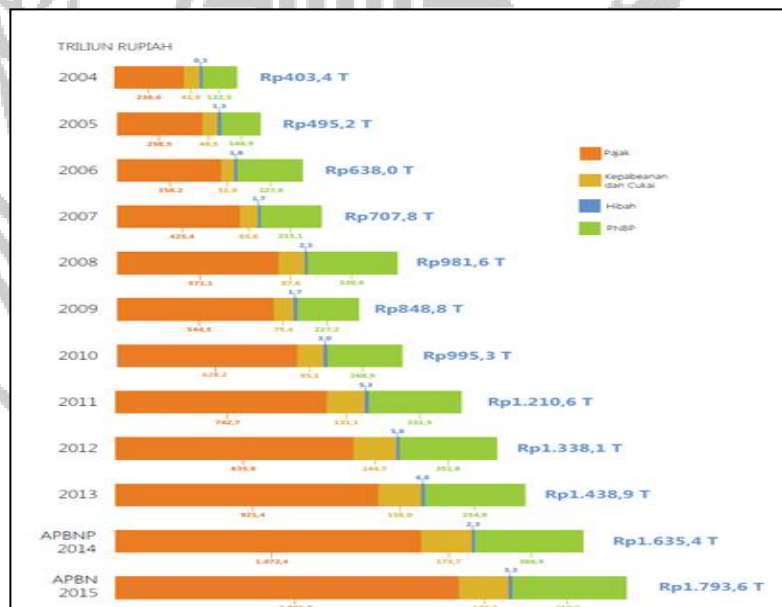


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa adanya timbal balik secara langsung. Pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak akan disalurkan kembali oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat melalui pengembangan dan pembangunan negara. Proses pengembangan dan pembangunan negara membutuhkan pendapatan negara yang tinggi. Sumber pendapatan negara disajikan dalam grafik berikut :



Sumber : www.anggaran.depkeu.go.id

Gambar 1.1
PENDAPATAN NEGARA 2004-2015

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa sumber utama pendapatan negara adalah pajak. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak guna meningkatkan pendapatan negara. Namun, dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa kendala, terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang berarti bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini yang menyebabkan banyaknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi dianggap tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain tidak diinginkan karena merugikan negara dari segi penerimaan negara.

Saat ini tidak sedikit perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, sebagai contoh Apple perusahaan *gadget* dengan kualitas kelas atas, ternyata juga melakukan praktik penghindaran pajak. Apple membayar pajak dengan sangat rendah di Amerika Serikat, dengan skema pajak tertentu lalu membuat *holding company* di Irlandia yang merupakan *tax heaven country* (Sheppard, 2014). Tak ketinggalan di Indonesia ternyata praktik penghindaran pajak juga banyak terjadi. Pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam 5 tahun

berturut-turut dan tidak membayar pajak (Rahmi, 2014). Laporan dari *Global Financial Integrity* (GFI) yang mencatat bahwa pada akhir tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke sembilan sebagai salah satu negara berkembang yang paling dirugikan akibat adanya praktek penghindaran pajak dalam periode 2001-2010 dengan potensi kerugian sebesar US\$109 miliar (www.lampost.co). Pada tahun 2010 Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengungkapkan kurang bayar pajak dari tiga perusahaan milik Grup Bakrie masing-masing Rp 1,5 triliun untuk PT. Kaltim Prima Coal, Rp 376 miliar untuk PT. Bumi Resources, dan US\$ 27,5 juta untuk PT. Arutmin. Hal ini terjadi karena ada bantuan aparat pajak yang sering disebut namanya terkait kasus pajak yaitu Gayus Tambunan (Mulyani, 2013). Sebelum melanjutkan pembahasan ini, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan “Kurang Bayar”. Kurang bayar adalah salah satu jenis dari Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). SKP kurang bayar (Pasal 13) menunjukkan bahwa pajak yang harus dibayarkan karena jumlah pajak yang dibayarkan sebelumnya kurang dari yang seharusnya. Kurang Bayar pajak tersebut harus dibayarkan sesegera mungkin bersama sanksi denda 2%. Kasus kurang bayar tersebut merupakan salah satu kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu, pernyataan mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya, beliau mengatakan bahwa ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara.

Agus Marto menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun (Wirna, 2014).

Kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh suatu perusahaan dipengaruhi oleh tata kelola perusahaannya (*corporate governance*) hal itu di perkuat oleh hasil peneliti yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi disisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Frieze, Link dan Mayer, 2006).

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Arah kinerja perusahaan dipengaruhi oleh pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. *Corporate governance* berperan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan membayar pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Sebuah perusahaan di kategorikan *Good Corporate Governance* (GCG), apabila prinsip-prinsip pokok *corporate governance* yang terdiri dari keterbukaan informasi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibilities*), kemandirian (*independency*), serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) dijalankan dalam perusahaan dengan baik, sehingga dalam hal membayar pajak perusahaan akan membayar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Namun ketika penerapan *corporate governance* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya

diterapkan dan tidak adanya pengawasan yang memadai, perusahaan dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dan hal ini merupakan praktik penghindaran pajak.

Corporate governance secara komperhensif (bersama-sama) biasanya diukur menggunakan proksi *Corporate Governance Indeks* (CGI) seperti yang dilakukan oleh Arifin (2003). Adanya keterbatasan *Corporate Governance Indeks* (CGI), dalam berbagai penelitian seringkali terkait *corporate governance* akan menggunakan proksi sebagai alat ukur (Arifin, 2003). Ada beberapa proksi yang dapat menjadi alat ukur *corporate governance* yaitu komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional dan kepemilikan saham publik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwis (2009) yang mengatakan bahwa praktek *corporate governance* di perusahaan dapat diproyeksi dengan keberadaan komisaris independen, kepemilikan managerial, kepemilikan institusional dan klasifikasi akuntan publik.

Keberadaan proksi dewan komisaris independen menunjukkan hasil yang berbeda-beda pada setiap penelitian. Pohan (2008) menemukan bukti adanya pengaruh positif antara dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* namun bertentangan dengan hasil penelitian Silvia dan Puji (2014). Selain itu, komite audit juga menunjukkan hasil yang berbeda antar penelitian. Hal ini terbukti dari penelitian Nuralifmida (2012) dan Pohan (2008) yang mengatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan I Gusti dan Ketut (2014) dan Silvia dan Puji (2014) menunjukkan pengaruh negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti dan Ketut (2014) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* namun berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuralifmida (2012) dan Pohan (2008). Penelitian ini termotivasi dari peneliti-peneliti yang sebelumnya menghasilkan hasil yang beragam serta menindak lanjuti keterbatasan-keterbatasan yang terjadi pada penelitian sebelumnya yang salah satunya adalah keterbatasan periode penelitian. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek yang berbeda yaitu perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 1. 1
PENERIMAAN PAJAK PER SEKTOR USAHA PERIODE
1 JANUARI S.D 8 AGUSTUS 2014

No	Jenis Sektor Usaha	Realisasi (Rp. Triliun)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,7
2	Jasa Profesional, ilmiah, dan Teknis	11,8
3	Administrasi Pemerintah dan Jaminan Sosial	12,4
4	Real Estate	12,6
5	Transportasi dan Pergudangan	17,9
6	Informasi dan Komunikasi	19,9
7	Konstruksi	26
8	Pertambangan dan Penggalian	36,4
9	Jasa Keuangan dan Asuransi	72,2
10	Perdagangan Besar dan Eceran	81,3
11	Industri Pengolahan	201,3
12	Sektor Lainnya/Jasa-jasa Lainnya	38,4

Belum termasuk penerimaan PBB dan PPh Migas

Sumber : Dashboard Penerimaan DJP

Berdasarkan tabel diatas, perusahaan pertambangan merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Namun, banyak perusahaan

pertambangan yang cukup bermasalah. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan, sekitar 60 persen perusahaan tambang di Indonesia tak membayar pajak dan royalti kepada Negara. Menurut Abraham, banyaknya perusahaan tambang yang mangkir dari kewajiban membayar pajak karena adanya kesepakatan ilegal dengan aparat dan pejabat di daerah (www.kompas.com). Hal ini terbukti dengan berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah perusahaan tambang baik Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai 10.800 perusahaan, namun hanya 6.000 yang statusnya *clear and clean*. Dari data Ditjen Pajak, sektor pertambangan merupakan usaha yang tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) masih sangat buruk. Terlebih lagi, banyak perusahaan yang memiliki lahan kuasa pertambangan tak mendaftarkan sebagai wajib pajak. Ini bisa terjadi lantaran izin usaha pertambangan saat ini diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Sebagai catatan, sampai 15 Desember 2012, penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari sektor pertambangan batu bara mencapai Rp 26,40 triliun. Angka ini sedikit mengalami kenaikan periode yang sama 2011 yakni sebesar Rp 22,92 triliun. Tetapi, porsi dari seluruh penerimaan PPh tahun lalu hanya sekitar 6,59 persen. Angka penerimaan ini cukup mengherankan karena ekspor komoditas batu bara tergolong besar. Setiap tahun rata-rata mencapai 20 miliar dollar Amerika Serikat (Perwitasari, 2013). Selain itu, adanya faktor ekonomi global yang lesu dengan ditandai menurunnya nilai jual rupiah berdampak pada penerimaan perusahaan pertambangan dan secara langsung penerimaan pajak juga terkena imbasnya.

Periode penelitian adalah tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 dimana periode tersebut merupakan periode data perusahaan yang terbaru sehingga data tersebut dapat merefleksikan keadaan perusahaan saat ini. Data yang diambil adalah delapan tahun terakhir karena pada tahun 2007 penurunan target penerimaan Negara mengalami penurunan karena terjadinya krisis ekonomi di Amerika Serikat yang berakibat pada pergeseran nilai-nilai ekonomi dunia salah satunya perusahaan sektor tambang di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan merosotnya harga komoditas, pendapatan dan laba perusahaan tambang sehingga perusahaan tambang harus memutar otak untuk mengurangi beban biaya operasionalnya agar bisa bertahan menghadapi dampak krisis yang lebih berat. "Apalagi, permintaan pasar semakin turun," tandas Priyo Pribadi Soemarno, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (www.investasi.kontan.co.id). Merosotnya laba perusahaan tambang akan mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Sedangkan, ditahun 2014 adalah tahun terakhir alasan perusahaan tidak mengetahui dengan benar pembayaran pajak karena pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Pajak sudah menerapkan tahun pembinaaan wajib pajak. Sehingga direntan periode 2007-2014 peneliti berharap dapat mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada studi empiris perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada periode 2007-2014.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah–masalah yang diteliti pada penelitian ini, yaitu:

- a. Apakah komite audit mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan?
- b. Apakah kualitas audit mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan?
- c. Apakah dewan komisaris independen mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan?
- d. Apakah kompensasi eksekutif mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan?
- e. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan?
- f. Apakah kepemilikan saham publik mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan.

- c. Untuk mengetahui pengaruh struktur dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan.
- d. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan.
- e. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan.
- f. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan saham publik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan.

1.4 **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi akademis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi terutama bagaimana tata kelola perusahaan yang baik mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan untuk pengungkapan lingkungan perusahaan dalam laporan tahunnya.
2. Bagi praktisi bisnis, memberikan pemahaman tentang pentingnya pengungkapan lingkungan perusahaan sehingga dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan.
3. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini secara sistematis dibagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab antara satu dengan yang lainnya terdapat keterkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, landasan teori, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variable, definisi operasi dan pengukuran variable, populasi dan sampel, serta teknis analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data yang memuat analisis dari hasil penelitian dalam bentuk analisis deskriptif, analisis statistik dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir, keterbatasan penelitian, dan saran.

